

# SASARAN DAN STRATEGI DAKWAH NAGARI

Awis Karni

*The target of dakwah is in society, that why the analysis weared sociology. We need to know how picture about Minangkabau village( that call nagari) society now. Later, after earning picture about Minangkabau nagari society, we can apply dakwah strategy to the nagari society. The writer tries to analyze the change of nagari society at present, and what to do with dakwah strategy in nagari development.*

## A. Pendahuluan

Berkaitan dengan “peme-taan sasaran”, tentu saja yang yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah masyarakat nagari se-bagai sasaran dakwah. Karena yang menjadi sasaran dakwah itu adalah masyarakat, maka analisis yang dipakai adalah analisis sosi-ologis. Saya kira yang diharap-kan adalah bagaimana gambaran tentang masyarakat nagari Mi-nangkabau sekarang? Kemudian setelah dapat gambaran tentang masyarakat nagari Minangkabau sekarang, baru dapat dijelaskan strategi dakwah yang bisa dite-rapkan kepada masyarakat nagari tersebut.

Bagi saya apa yang akan saya kemukakan ini hanya seba-gai *sharing* pendapat tentang apa

yang saya pikirkan dan lihat de-ngan para pembaca dan pemerhati dakwah.

## B. Masyarakat nagari yang berubah

Untuk menggambarkan ma-syarakat Minangkabau yang se-dang berubah atau memang sudah berubah di bawah ini akan saya kutipkan dengan cukup panjang pendapat dari Nursyirwan Effen-di, dosen FISIP jurusan Antro-pologi Unand, Ketua DIVISI Pe-ngembangan Adat Basandi Sya-rak, Syarak Basandi Kitabullah, ICMI Orwil Sumbar. Pendapat ini pernah disampaikannya dalam Seminar dan Lokakarya (SEMI-LOKA) “Kembali Ke Surau” pada tanggal 27 Juni 2001 / 5 Ra-biul Akhir 1422 di Hotel Bumi Minang, Padang, dengan judul

makalah "Surau dalam Pengembangan Masyarakat Nagari".<sup>1</sup>

Sebagai suatu konsepsi budaya, nagari mewakili realitas geneologis dan teritorial dari masyarakat Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Sementara masyarakat Sumatera Barat lainnya, seperti Mentawai, Jawa, Cina dsb. dapat mengadopsi dan menginternalisasikan substansi universal dari keberadaan sistem masyarakat dan budaya dalam nagari. Dengan demikian, hubungan antar anggota masyarakat dapat menciptakan ikatan sosial yang sama maknanya.

Akhir-akhir ini, hubungan antar anggota masyarakat dalam nagari, atau Sumatera Barat pada umumnya, terkristal sebagai suatu realitas ekonomi, khususnya kepada gambaran pola hidup masyarakat yang mengejar kekuatan materi dan status material. Sementara, kekuatan nilai dan norma budaya Minangkabau hanya berkontribusi kecil sebagai pedoman. Dengan kata lain, kebudayaan hanya ditempatkan sebagai suplemen solusi bagi kerumitan interaksi sosial. Ini artinya, budaya Minangkabau cenderung tidak lagi menjadi kekuatan nilai

<sup>1</sup>Lihat Nursyirwan Effendi, "Surau dalam Pengembangan Masyarakat Nagari" (makalah) disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya (SEMI-LOKA) "Kembali Ke Surau" pada tanggal 27 Juni 2001 / 5 Rabiul Akhir 1422 di Hotel Bumi Minang, Padang.

bagi pembentukan sikap dan perilaku masyarakat.

Dalam tingkatan tertentu, orang Minangkabau seringkali dihadapkan untuk memilah-milah opsi ekonomi, kebudayaan atau agama dalam pola hidup mereka. Sehingga, dapat diamati terdapatnya kebingungan dari banyak anggota masyarakat dalam memilih peran mereka. Mereka tidak lagi mendengar kehendak kolektif, tetapi lebih percaya kepada kehendak individual. Hal ini kemudian berkausalitas kepada masalah yang sedang terjadi di dalam masyarakat Minangkabau, antara lain soal krisis identitas dan solidaritas sosial, melemahnya struktur sosial dalam masyarakat, penurunan kapasitas intelektual masyarakat, dan menipisnya peran agama dalam masyarakat.

Secara empirik, masyarakat kebanyakan telah mulai terbiasa bersikap dan berperilaku *consumerism* (pola perilaku yang konsumtif) yang kadang kala sangat vulgar. Salah satu inti dari pola perilaku tersebut adalah memanfaatkan atribut material untuk prestise dan peninggian status secara sengaja dan terang-terangan (*visible*). Konsekuensinya, banyak orang Minangkabau yang merasa penting dan perlu untuk meng-*exclude* (mengeluarkan) peran dan fungsi nilai agama dan norma budaya sebagai basis, acuan dan kontrol perilaku sosial

dalam rangka meninggikan status dan prestise mereka. Hasilnya banyak orang yang sudah tidak begitu percaya lagi bahwa atribut agama dan budaya dapat berfungsi dan berperan utama dalam meninggikan kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat. Ini artinya jelas bahwa sedang berlangsung proses degradasi fungsi agama dan sekaligus budaya yang sengaja dan sadar dibangun dalam masyarakat.

Kutipan di atas mungkin bagi sebagian kita cukup mengagetkan dan menimbulkan pertanyaan, "apakah memang orang Minangkabau tidak berpegang lagi kepada adat dan agama, mereka sudah hidup dengan pola konsumtif dan individual?" Apabila kita respon secara emosional, mungkin jawaban yang kita kemukakan bahwa apa yang diketengahkan Nursyirwan Effendi di atas tidak benar, kalau hal itu hasil penelitian, maka metodologinya salah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau objektif dan jujur, tentu apa yang dilihat oleh Nursyirwan Effendi akan kita ukur dengan konsep idea masyarakat Minangkabau, baik yang kita terima secara turun temurun atau apa yang dapat kita baca dari literatur. Sebagai suatu contoh, filosofi yang sering kita dengar pola hidup masyarakat Minangkabau itu adalah berdasar agama. "*Syarak mangato Adat mamakai, Adat basandi Syarak, Syarak Ba-*

*sandi Kitabullah*". Sekarang kalau kita munculkan pertanyaan mana daerah yang dapat dijadikan contoh di Minangkabau dengan teguh memegang filosofi itu? Saya kira jawabannya akan sulit kita temukan, walaupun ada hanya bersifat apologia saja. Begitu juga halnya yang berkaitan dengan filosofi rasa kesatuan, persatuan serta rasa cinta dalam masyarakat Minangkabau, seperti "*Sasakik sasanang, sahino samalu, ka bukk samo mandaki, ka lurah samo mamurun, tatalungkuik samo makan tanah, tatilantang samo mimum ambun, ado samo dimakan, indak ado samo dicari, hati gajah samo dilapah, hati tungau samo dicawah*." Saya kira dalam hal ini benar apa yang dikemukakan apa yang Nursyirwan, walaupun tidak 100%, tapi dalam hal lain kita masih punya semangat dan "rasa" sebagai orang Minangkabau.

Kecuali gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat Minangkabau berkaitan dengan agama dan adat seperti yang dikemukakan di atas, lebih jauh kondisi sosial ekonomi masyarakat Minangkabau juga cukup memprihatinkan, dalam bahasa agama dapat disebut dengan kaum *dhu'afa*.

Kondisi miskin tersebut menyebabkan sebagian besar waktu mereka digunakan untuk bekerja mencari nafkah, sehingga sedikit waktu yang dapat digunakan untuk aspek kehidupan

lainnya, termasuk berkaitan dengan kegiatan keagamaan, pendidikan anak, berinteraksi dan bersinergi dengan masyarakat lain.

Kondisi miskin berimplikasi terhadap masalah pendidikan anak, baik pendidikan agama atau umum. Sering dilaporkan bahwa 40% siswa Sumbar tidak mampu membaca al-Qur'an.

Dalam laporan 1992 anak-anak usia sekolah yang putus sekolah 26.000 orang. Pada tahun 2001 diperkirakan 15% anak-anak usia 7-12 tahun putus sekolah di Sumatera Barat (idealnya sekitar 1%).<sup>2</sup>

Kondisi miskin juga menyebabkan akses yang rendah terhadap masalah kesehatan. Mereka cenderung membiarkan penyakit yang mereka derita (melakukan pengobatan dengan cara sendiri) sampai pada tingkat yang tidak "tertanggung" barulah mereka mereka mencari pertolongan.

Kondisi masyarakat yang seperti dikemukakan di atas itu adalah bagian dari gambaran masyarakat nagari sebagai sasaran dakwah. Apabila dakwah, seperti yang dipahami, adalah membawa

umat dari kondisi yang kurang baik kepada yang lebih baik, tentu saja dalam hal ini dakwah yang dilakukan harus berangkat dari kebutuhan dan kondisi masyarakat yang ada. Untuk itu dakwah harus dilakukan dengan melalui strategi dan perencanaan yang matang. Maka dari itu pekerja dakwah, baik itu da'i pengelola lembaga-lembaga dakwah yang ada harus membuat program yang bersentuhan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai objek (sasaran dakwah). Kegiatan lembaga-lembaga dakwah yang ada diarahkan sebesar-besarnya kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini harus dilakukan dengan secara simultan dengan perbaikan kondisi moral masyarakat, seperti yang dikemukakan pada awal fasal ini.

### C. Revitalisasi Fungsi Masjid

(sebuah strategi dakwah)

Masjid di Minangkabau dalam filosofi kelembagaan adalah sebagai "*sumarak nagari*". Masjid adalah salah satu syarat sahnya suatu daerah di Minangkabau disebut sebagai *nagari*. Dengan demikian masjid bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sebuah nagari di samping *balai adat*. Masjid sebagai lembaga agama dan balai adat sebagai lembaga kebudayaan. Kedudukan masjid di samping *balai adat* adalah pernyataan dari kedudukan pendukung utama dari kedua lembaga itu --alim-ulama

<sup>2</sup>Lihat Helmi, *Konsep dan Strategi Peningkatan Peran Masjid Surau dalam Kehidupan Ummat di Sumatera Barat* (makalah) disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya (SEMI-LOKA) "Kembali Ke Surau" pada tanggal 27 Juni 2001 / 5 Rabiul Akhir 1422 di Hotel Bumi Minang Padang

dan ninik-mamak -- dalam masyarakat. Alim-ulama dan ninik-mamak adalah dua golongan pimpinan yang bekerja bersama-sama dalam bidang yang berbeda. Alim-ulama adalah pimpinan rohaniyah masyarakat dan ninik-mamak pimpinan adat atau kebudayaan.

Tanpa mengurangi fungsi masjid dalam struktur masyarakat Minangkabau, tetapi dalam arti yang lebih luas secara historis fungsi masjid adalah pusat pengembangan umat dan kebudayaan Islam. Artinya, aspek-aspek kehidupan sosial, ekonomi, kebijakan/politik yang berkaitan dengan kehidupan umat dan syariahnya Islam adalah bagian dari kegiatan masjid.

Prof. DR. M. Quraish Shihab<sup>3</sup> mengemukakan tidak kurang dari sepuluh peranan Masjid Nabawi, sebagai sebuah yang dibina oleh Rasulullah sebagai pusat kegiatan umat, yaitu sebagai:

1. Tempat ibadah (shalat, zikir).
2. Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi-sosial budaya).
3. Tempat pendidikan

---

<sup>3</sup>Prof. Dr. Quraish Shihab adalah Guru Besar dalam mata kuliah Tafsir pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendapatnya tentang fungsi masjid di atas dalam dilihat dalam *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung, Mizan: 1996) cet. I, hal. 462-3.

4. Tempat santunan sosial.
5. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya.
6. Tempat pengobatan para korban perang.
7. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa.
8. Aula dan tempat menerima tamu.
9. Tempat menawan tahanan, dan
10. Pusat penerangan dan pembealaan agama.

Agaknya masjid pada masa silam mampu berperan sedemikian luas, disebabkan antara lain oleh:

1. Keadaan masyarakat yang masih sangat berpegang teguh kepada nilai, norma dan jiwa agama.
2. Kemampuan pembina-pembina masjid menghubungkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dengan uraian dan kegiatan masjid.
3. Manifestasi pemerintahan terlaksana di dalam masjid, baik pada pribadi-pribadi pemimpin pemerintahan yang menjadi imam/ khatib maupun di dalam ruangan-ruangan masjid yang dijadikan tempat kegiatan pemerintahan dan *syura* (musyawarah).

Keadaan itu kini telah berubah, sehingga timbullah lembaga-lembaga baru yang mengambil alih sebagian peranan masjid di masa lalu, yaitu organisasi-organisasi keagamaan swasta dan

lembaga-lembaga pemerintah, sebagai pengarah kehidupan dunia-wi umat beragama. Lembaga-lembaga itu memiliki kemampuan material dan teknis melebihi masjid. Fungsi dan peranan masjid besar seperti yang disebutkan pada masa keemasan Islam itu tentunya sulit diwujudkan pada masa kini. Namun, tidak berarti bahwa masjid tidak dapat berperan dalam hal-hal tersebut.

Masjid, khususnya masjid besar, harus mampu melakukan kesepuluh peran tadi. Paling tidak melalui uraian para pembinanya guna mengarahkan umat pada kehidupan duniawi dan ukhrawi yang lebih berkualitas. Untuk itu pada zaman sekarang ini masjid paling tidak dapat menjalankan fungsi sebagai: 1) Tempat ibadah (shalat, zikir); 2) Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi-sosial budaya); 3) Tempat pendidikan; 4) Tempat santunan sosial (pengelolaan zakat); 5) Tempat pengobatan/ poliklinik; 6) Aula dan tempat menerima tamu; 7) Pusat penerangan dan informasi penyebaran/pembelaan agama.

Apabila masjid dituntut berfungsi membina umat, tentu sarana yang dimilikinya harus tepat, menyenangkan dan menarik semua umat, baik dewasa, anak-anak, tua, muda, pria, wanita, yang terpelajar maupun tidak, sehat atau sakit, serta kaya dan miskin.

Di dalam Mukhtamar Risa-latul Masjid di Makkah pada 1975, hal ini telah didiskusikan dan disepakati, bahwa suatu masjid baru dapat dikatakan berperan secara baik apabila memiliki ruangan dan peralatan untuk:

- Ruang shalat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.
- Ruang-ruang khusus wanita yang memungkinkan mereka keluar masuk tanpa bercampur dengan pria baik digunakan untuk shalat, maupun untuk pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK).
- Ruang pertemuan dan perpustakaan.
- Ruang poliklinik dan ruang untuk memandikan dan mengkafani mayat.
- Ruang bermain, berolah raga dan berlatih bagi remaja.

Menurut saya, dari apa yang dikemukakan di atas berkaitan dengan fungsi masjid, menimbulkan suatu pertanyaan bagi kita semua, "sudah seberapa jauh masjid yang kita bina menjalankan fungsi-fungsi di atas?" Bagi saya hal ini sangat penting bahwa strategi yang tepat dalam melaksanakan dakwah adalah dengan memfungsikan masjid secara maksimal. Fungsi-fungsi yang dijalankan masjid bersentuhan secara langsung dengan kebutuhan umat, baik yang berkaitan dengan masalah rohani dan jasmani. Apabila fungsi-fungsi yang dijalankan

masjid bersentuhan dengan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, maka umat akan datang ke masjid.

Kalau kita mau melihat dengan jujur kegiatan masjid yang ada di Minangkabau sekarang ini mungkin 90% atau lebih adalah menjalankan fungsi ritual. Dengan demikian fungsi-fungsi lainnya terabaikan. Maka dari itu fungsi-fungsi lainnya dari sebuah masjid perlu diaktualkan kembali dalam rangka menjawab pertanyaan seperti yang dikemukakan di atas.

#### **D. Perbaikan kelembagaan**

Upaya yang harus dilakukan agar masjid berfungsi dengan sebagai yang dikemukakan terdahulu adalah menyangkut dengan kelembagaan dan manajemen masjid. Berkaitan dengan kelembagaan masjid tentu saja yang harus dilengkapi atau diwujudkan berkaitan dengan fungsi masjid sebagai sarana ibadah, seperti sarana prasarana pendidikan (TPA, MDA dan pustaka), ekonomi/ sosial (badan amil zakat, aula pertemuan), informasi/ komunikasi (warnet-warung internet, dan seharusnya masjid, terutama masjid besar sudah mempunyai jaringan internet dengan masjid besar lainnya), kesehatan (poliklinik atau balai pengobatan).

Berkaitan dengan manajemen diarahkan kepada peningkatan fungsi dan peran masjid, sebagai dikemukakan terdahulu. Se-

suai dengan fungsi manajemen -- perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan--, maka pengurus harian masjid harus melaksanakan fungsi tersebut dengan sebaiknya. Dengan demikian kegiatan masjid dapat terukur dan dievaluasi dengan baik. Perencanaan umpamanya, harus berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi masyarakat yang ada. Maka dari itu sebelum dibuat suatu program kegiatan dakwah harus terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan, baik itu berkaitan dengan peluang keberhasilan dan tantangan yang mungkin dihadapi.

Untuk tercapainya kegiatan manajemen dengan baik faktor lain yang sangat menunjang adalah profesionalisme dan transparansi. Hal ini menjadi sangat penting karena ada kesan selama ini bahwa manajemen masjid adalah manajemen yang tidak "terbuka" dan kerjanya berdasarkan "*lillahi ta'ala*" dalam arti sempit. Maka dari itu untuk jalannya manajemen masjid dengan baik untuk tingkat awal perlu dilakukan pendampingan. Pendampingan berkaitan dengan perubahan persepsi pembangunan masjid dan takmirul masjid ke arah yang lebih terpadu (*integrated*).

Permasalahan manajemen juga menyangkut dengan pembinaan dan perhatian kepada ulama, da'i dan guru, pengurus dlsb. Hal ini menjadi penting karena

selama ini orang yang bergerak dalam kegiatan masjid hanya memanfaatkan waktu luang. Dengan bahasa lain dapat dikatakan bahwa pekerjaan membangun dan mengisi kegiatan masjid bukan aktivitas yang “membanggakan”,<sup>4</sup> malahan pekerjaan ini hanya pekerjaan mereka yang berada pada kelas lebih bawah dari pada mereka yang bekerja pada lembaga “resmi”.

---

<sup>4</sup>Dalam sejarah masyarakat Minangkabau tempo dulu orang bangga menjadi orang *siak*, guru agama, ulama. Tapi sekarang kalau ada anak-anak nagari masuk sekolah agama, tapi sekolah agama itu sudah pilihan nomor 2 atau mungkin nomor terakhir. Maka anak-anak yang masuk sekolah agama kemampuan intelektualnya rendah, pada sisi lain mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang kemampuan intelektualnya tinggi, juga secara materi mereka punya kemampuan materi lebih. Dan secara ideal harapan besar masih diharapkan kepada mereka dan saya kira untuk masa sekarang ini penghargaan masyarakat terhadap ulama tidak seimbang dengan pengorbanan yang mereka berikan, berbeda dengan tempo dulu. Tidak jarang terjadi ulama “dicaci maki” dengan sebutan menjual ayat atau ulama amplop. Dan kadang-kadang seolah-olah tanggung jawab beragama terletak pada ulama. Hal ini saya kira salah persepsi. Menurut saya tanggung beragama adalah tanggung jawab semua.

## E. Penutup

Masyarakat nagari di Minangkabau sebagai sasaran telah mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman. Tugas dakwah adalah bagaimana perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu tidak menghilangkan identitas orang Minangkabau sebagai masyarakat yang punya adat dan agama atau dengan kata lain mereka tidak menyimpang dari rel “*Syarak mangato Adat mamakai, Adat basandi Syarak, Syarak Basan Kitabullah*”. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memfungsikan masjid sebagai pusat budaya, baik itu berkaitan dengan masalah agama, budaya, pendidikan, sosial, kesehatan dlsb. Dengan bahasa dapat dikatakan bahwa dakwah yang akan dilaksanakan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan hasilnya dapat dirayakan oleh masyarakat atau dakwah *hil hal*.

\* Makalah di atas pernah disampaikan pada: SEMINAR DAN LOKAKARYA KEMBALI KE SURAU; Di LUBUK BASUNG KAB. AGAM, 29 Desember 2003